92

PERUBAHAN BENTUK PERUM PERHUTANI MENJADI PERSERO

Dudung Darusman
(Guru Besar dan Kepala Lab. Politik-Ekonomi dan Sosial Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB, Bogor)

Disampaikan pada acara Diskusi Interaktif di Gedung Perum Perhutani Unit III Bandung, 12 April 2001

Keputusan perubahan bentuk Perum Perhutani menjadi Persero ditetapkan oleh Presiden RI pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2001, tanggal 23 Maret 2001. Berikut ini beberapa komentar dari penulis yang secara prinsip menganggap PP tersebut keliru.

1. Dasar pertimbangan PP tersebut, yang dimuat pada diktum menimbang, adalah efisiensi dan efektivitas yang tampaknya sangat sempit dan kurang komprehensif. Dengan menjadi Persero, efisiensi finansial Perhutani mungkin saja akan naik, tetapi efisiensi ekonominya akan menurun, karena akan terjadi pergeseran biaya dan manfaat sosial-ekonomi dari dan kepada biaya dan manfaat perusahaan. Juga dari segi efisiensi pengelolaan sumberdaya alam hutan akan menurun, yang akan ditunjukkan oleh penurunan indikator "*eco-service efficiency*". Padahal keberadaan Perhutani dalam bentuk Perum adalah untuk mencapai keseimbangan optimum dari ketiga indikator efisiensi tersebut, yang dalam bentuk Persero hanya mementingkan indikator efisiensi finansial saja.

2. Dalam diktum mengingat, sama sekali tidak memperhatikan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, termasuk dalam hal badan usaha kehutanan, yang secara sosial-ekonomi dan politis proses otonomisasi itu sangat penting untuk segera diimplementasi-kan. Sikap "*ignorance*" seperti keluarnya PP No. 14-2001 ini sangat menyinggung perasaan masyarakat, terutama di daerah, serta menambah ketidakpastian sosial-ekonomi dan politik, yang akan berakibat semakin hancurnya perekonomian di negara ini. Munculnya PP ini sama sekali tidak memperjelas kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan jajarannya dalam pengelolaan hutan, sehingga proses penghancuran hutan akan terus berlanjut dan semakin parah.

3. Diakui bahwa selama ini dari segi efisiensi finansial dan ekonomi Perum Perhutani masih belum atau kurang optimal. Semasa penulis menjadi anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani dari tahun 1994 sampai 1998, pernah menyatakan bahwa Perum Perhutani seharusnya mampu menciptakan keuntungan 3 kali lipat, penciptaan lapangan kerja 4 kali lipat, serta memberi kontribusi PAD kepada Pemda setempat yang cukup signifikan. Tetapi untuk peningkatan itu semua tidak dengan cara merubah bentuk Perum menjadi Persero, tetapi melalui langkah-langkah perubahan sebagai berikut :

a. Perubahan secara bertahap dari Direksi dan jajaran pimpinan di bawahnya yang bersifat "pegawai pemerintah yang birokratis dan otoriter" menjadi "profesional dan demokratis". Dalam hal ini perlu perubahan dalam pola "*recruitment*" dan lamanya *(term)* dari jabatan.

b. Penyebaran (desentralisasi, dekonsentrasi) kewenangan pangambilan keputusan ketingkat Pimpinan Unit dan KKPH/Administratur, agar mampu dan cepat dalam merespons situasi dan kesempatan (bisnis dan non-bisnis) yang beragam dan berubah secara cepat di lapangan.

c. Perubahan atau penyempurnaan peraturan yang selama ini memberi kekuasaan kepada Pemerintah (Departemen terkait) untuk melakukan intervensi yang justru mengurangi keleluasaan Direksi dan jajarannya untuk mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan kinerja/efisiensi perusahaan secara optimum.

4. Sesungguhnya telah banyak sekali tulisan dan pendapat yang konstruktif untuk membuat Perum Perhutani memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa ini, seperti diantaranya yang dikemukakan penulis dalam "Memori Serah Terima Jabatan Dewan Pengawas Perum Perhutani, Periode Oktober 1994 - Oktober 1998, tanggal 30 Oktober 1998", juga dalam "Butir-butir Masukan Reformasi Perum Perhutani, tanggal 19 Nopember 1998", serta banyak lagi tulisan/laporan hasil kerja periodik Dewan Pengawas selama periode 1994 - 1998 tersebut.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Mari kita berbuat yang terbaik untuk Bangsa Indonesia ini, disertai kehati-hatian yang tinggi, terutama dalam situasi kritis yang semakin kompleks ini.

Rimbawan dalam sejarah Indonesia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan bangsanya secara keseluruhan. Bahkan fakta sejarah membuktikan bahwa Rimbawan selalu yang paling depan dalam berkorban untuk keselamatan bangsa ini. Kiranya profesional lain, terutama politikus, dapat menyadarinya. Insya Allah.